

Perjuangan HTI dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia dan Metamorfosisnya di Media Online

Annisa Wahid

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia
Annisawahid8@gmail.com

Yayan Saputra

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia
Yayansaputra@uinib.ac.id

Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali

Universiti Malaya Kuala Lumpur, Malaysia
Wzk_ali@um.edu.my

Suggested Citation:

Wahid, Annisa; Saputra, Yayan; Ali, Wan Zailan Kamaruddin Wan. (2023). Perjuangan HTI dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia dan Metamorfosisnya di Media Online. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*. Volume 7, Nomor 1: 47-56. <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v7i1.30064>

Article's History:

Received October 2023; Revised January 2024; Accepted January 2024.
2024. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) is a transnational Islamic movement advocating for the global establishment of the Islamic caliphate. This research aims to understand how HTI struggles to establish the caliphate system in Indonesia and how the BMI group, which is a result of HTI's metamorphosis, spreads its ideology and carries out HTI's movements that have been legalized by the government. This study uses a qualitative text research method, examining bulletins, lectures, and blogs shared online by the BMI group. Data and data sources for this research were obtained through literature reviews in the form of books, journals, and literature discussing the research object. For data analysis techniques, the researcher used social movement theories, namely framing theory and cyber media theory. The results of this research indicate that the HTI group, after being disbanded by the government, did not stop but transformed into other groups, such as joining the BMI group. This can be proven by the similarities in ideology and the movement patterns of HTI and BMI. Both ideologies aim to establish the caliphate in Indonesia. In the BMI understanding, they reject ideologies outside of Islam, such as democracy, capitalism, communism, and liberalism. In carrying out their movements, both the HTI and BMI have similar patterns, such as spreading their beliefs through online media, taking to the streets, distributing bulletins, organizing demonstrations, and approaching public figures.

Keywords: religion and state; student activities; international religious organizations; political organizations; caliphate system.

Abstrak:

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah gerakan Islam transnasional yang mengadvokasi berdirinya kekhalifahan Islam secara global. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjuangan HTI menegakkan sistem khilafah di Indonesia dan bagaimana kelompok BMI hasil metamorfosis HTI menyebarkan ideologinya dan menjalankan gerakan-gerakan HTI yang telah dilegalkan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian teks kualitatif, meneliti buletin, ceramah, dan blog yang dibagikan secara online oleh kelompok BMI.

Data dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka berupa buku, jurnal, dan literatur yang membahas objek penelitian. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan teori gerakan sosial yaitu teori framing dan teori media siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah tidak berhenti melainkan bertransformasi menjadi kelompok lain seperti bergabung dengan kelompok BMI (Back To Muslim Identity). Hal ini terlihat dari kesamaan ideologi dan pola gerakan HTI dan BMI. Kedua ideologi tersebut bertujuan untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Dalam pemahaman BMI, mereka menolak ideologi di luar Islam, seperti demokrasi, kapitalisme, komunisme, dan liberalisme. Dalam menjalankan gerakannya, baik HTI maupun BMI mempunyai pola serupa, seperti menyebarkan keyakinannya melalui media online, turun ke jalan, menyebarkan buletin, mengorganisir demonstrasi, dan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat.

Kata Kunci: agama dan negara; aktivitas mahasiswa; organisasi keagamaan internasional; organisasi politik; sistem khilafah.

PENDAHULUAN

Bentuk negara-bangsa telah menjadi kesepakatan di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi masih ada pihak yang ingin merundingkan kembali kesepakatan tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu pihak yang ingin membuka wacana baru tentang bentuk negara dengan menyebarkan sistem khilafah kepada masyarakat (Fitriyana, 2019). Diskusi tentang sistem khilafah yang dianut oleh HTI telah berkembang dari kelompok-kelompok kecil hingga konferensi internasional. Menurut kelompok tersebut, mereka bercita-cita untuk membangkitkan kembali umat Islam dari penurunan, membebaskan orang-orang dari gagasan-gagasan non-Islam, sistem hukum yang bukan dari Islam, dan hukum-hukum yang bukan berasal dari keyakinan mereka, serta membebaskan mereka dari pengaruh dan dominasi negara-negara non-Muslim. Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk mengembalikan Kekhilafahan Islam sehingga hukum-hukum Allah dapat diberlakukan kembali. Ideologi transnasional HTI juga telah mencapai Indonesia (Arifan, 2014).

HTI didirikan pada tahun 1982 dan awalnya dipimpin oleh Abdurrahman al-Baghdadi, pemimpin Hizbut Tahrir di Australia, yang kemudian pindah ke Bogor, Jawa Barat, atas undangan K.H. Abdullah bin Nuh, kepala pesantren Al-Ghazali dan dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI). Seperti gerakan Tarbiyah, HTI mengalami pertumbuhan yang pesat melalui komunitas mahasiswa yang aktif dalam dakwah di kampus-kampus. Namun, kehadiran HTI di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, yang mengakibatkan banyak kelompok yang mendukung pembubaran gerakan HTI di Indonesia. Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028.60.10 tahun 2014 tentang persetujuan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Azman, 2018; Setia et al., 2022).

Dengan pembubaran HTI, banyak kelompok baru muncul dan aktif menyebarkan serta menanamkan nilai-nilai ideologi khilafah. Salah satu kelompok ini adalah BMI, yang diduga merupakan keturunan langsung dari HTI. Hal ini dapat dikuatkan oleh beberapa temuan penelitian, termasuk karya Siti Nurfitriyana (2019) berjudul "Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca Pembubaran." Dalam tulisan ini, keberadaan organisasi pasca-HTI dibahas, dengan fokus pada komitmen ideologis mereka terhadap khilafah. Kelompok-kelompok ini menggunakan berbagai media untuk menyebarkan ideologi mereka, termasuk media cetak yang didistribusikan di seluruh Indonesia, dengan total produksi yang melebihi 10.000 eksemplar. Juga penting adalah penggunaan media baru mereka dalam menyebarkan kegiatan dakwah mereka, dan mereka telah mengubah gerak mereka menjadi GP (Gerakan Pembaharuan), BMI, dan Muslimah News ID (Brown, 2000).

BMI adalah sebuah kelompok gerakan keagamaan yang aktif di media online, berdiri sejak tahun 2016. Namun, mereka tidak terlalu aktif pada awalnya. Tetapi, sejak akhir tahun 2017, ketika badan organisasi HTI dicabut, BMI mulai aktif dan bergerak secara besar-besaran dalam menyebarkan dan menanamkan ideologi khilafah (Sinaga et al., 2022). Kelompok BMI terutama terdiri dari perempuan muslimah, terutama anak-anak muda zaman sekarang, seperti mahasiswi di kampus-kampus Islam. Kelompok BMI bertujuan untuk

menegakkan syariat Islam. Selain itu, mereka juga aktif dalam merespons situasi politik dan peristiwa-peristiwa yang sedang hangat terjadi di Indonesia. Kelompok BMI selalu melihat setiap peristiwa dari sudut pandang Islam dan mencari solusi dari sudut pandang Islam juga (Sukmana, 2016).

Penelitian ini didasarkan pada perjuangan HTI di Indonesia dalam menegakkan sistem khilafah, dan bagaimana setelah HTI dibubarkan, muncul gerakan-gerakan yang diduga merupakan metamorfosis dari HTI. Pencabutan izin badan organisasi HTI di Indonesia disebabkan oleh perbedaan pandangan dengan pemerintah (Haris et al., 2019). Oleh karena itu, warga negara Indonesia diharapkan menjaga kesatuan NKRI dan mencegah munculnya pemahaman yang dapat merusak negara dan membahayakan warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana perjuangan HTI dalam sistem kenegaraan di Indonesia dan bagaimana akhirnya bertransformasi di media online. Salah satu hasil transformasi tersebut adalah kelompok BMI yang berperan dalam menyebarkan ideologi khilafah dan melanjutkan gerakan HTI yang telah diizinkan oleh pemerintah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh bersama terhadap pola yang akan dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana dikatakan oleh Mely G. Tann bahwa penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu keadaan atau kelompok tertentu yang benar (Moleong, 2007). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif teks dengan menggunakan teori gerakan sosial keagamaan, yaitu teori framing. Data dalam penelitian ini terkait dengan ideologi dan pola gerakan HTI yang kemudian mengalami metamorfosis ke dalam sebuah kelompok BMI di media sosial. Peneliti ingin melihat apakah ideologi dan pola gerakan BMI memiliki kesamaan dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil kepustakaan berupa buku, jurnal, dan studi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Zoom) yang digunakan sebagai alat untuk mengamati gerakan sosial mereka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang ideologi dan pola gerakan HTI dari akun atau situs web Back To Muslim Identity.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir pertama kali didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977), bersama Dawud Hamdan, dan Namr al-Mishri yang berasal dari Al-Quds, Palestina. Gerakan Islamisme ini ingin mendirikan sistem khilafah untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Barat dan kemudian menerapkan hukum Islam di seluruh dunia. Hizbut Tahrir pernah mengajukan izin pendirian partai politik, namun ditolak oleh Departemen Dalam Negeri Pemerintah Yordania, dan tidak disetujui karena dianggap ilegal. Setelah Taqiyuddin al-Nabhani meninggal (1977 M), kepemimpinan HTI dilanjutkan oleh Abd' al-Qadim Zallum hingga tahun 2003, kemudian dilanjutkan oleh Abu Rashthah hingga tahun 2011. Kegiatan utama dari Hizbut Tahrir adalah ideologi Islam dan politik. Agenda utama Hizbut Tahrir adalah membangkitkan kembali sistem Khilafah Islamiyah dan menerapkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Mereka berusaha membangun sistem politik dan tatanan masyarakat yang berdasarkan landasan aqidah Islam agar bisa diterapkan dalam undang-undang dan konstitusi (Azis, 2003).

Penyebaran ideologi transnasional HTI juga mencapai Indonesia. HTI sendiri didirikan pada tahun 1982 dan awalnya dipimpin oleh Abdurrahman al-Baghdadi, pemimpin Hizbut Tahrir di Australia, yang kemudian pindah ke Bogor, Jawa Barat, atas undangan KH Abdullah bin Nuh, pimpinan pesantren Al-Ghazali dan dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI). Seperti halnya gerakan Tarbiyah, HTI mengalami penyebaran pesat melalui komunitas mahasiswa yang tergabung dalam dakwah di kampus. Namun, pada masa rezim Soeharto, HTI menjadi gerakan bawah tanah (clandestine) hingga runtuhnya Rezim Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang melarang aktivitas politik mahasiswa. HTI sendiri dikategorikan sebagai "Islam transnasional" yang sering menjadi pembicaraan di ruang publik maupun akademis, seiring dengan menyebarnya wacana Khilafah Islamiyah yang telah dibawa oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Arifin, 2014).

Perjuangan HTI dalam Menerapkan Ideologi Khilafah pada Tataran Sistem Kenegaraan di Indonesia

Tujuan utama pergerakan HTI adalah penegakan syariah Islam. Oleh karena itu, seluruh gerakan HTI adalah strategi untuk mewujudkan penegakan syariah tersebut. Dengan demikian, HTI adalah gerakan Islam yang menjadikan dirinya sebagai wahana bagi tujuan utama penegakan syariah Islam secara sosio-politik. Dalam menegakkan sistem khilafah di Indonesia, HTI melakukan segala upaya dan cara agar ideologi khilafah bisa diimplementasikan. Ada dua strategi yang digunakan. Pertama, strategi ideal. Strategi ini mencakup pendirian Khilafah Islamiyah sebagai pra-syarat struktural bagi penerapan syariah atau ideologi khilafah. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan praktik politik Nabi yang mengangkat khalifah sebagai pelaksana syariah. Artinya, untuk menerapkan syariah, harus ada khalifah sebagai legislator penerapan syariah. Dalam konteks ini, penerapan syariah memiliki dua tahap. Tahap pertama, sebagai konstitusi (dustur). Konstitusi syariah berisi pokok-pokok penting dari syariah yang dapat menggambarkan syariah Islam secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Tahap kedua sebagai undang-undang (qanun), yaitu peraturan-peraturan syariah di berbagai bidang kehidupan (Hayati, 2017).

Dalam konteks ini, HTI kemudian merumuskan perspektif syariah dalam pengelolaan semua sektor kenegaraan, mulai dari sumber daya alam, pendidikan Islam, tenaga kerja, kemiskinan, good government, kriminalitas, pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan penanganan korupsi. Hal ini merupakan "kampanye komprehensif" terhadap kemampuan syariah dalam menyelesaikan semua permasalahan, sehingga isu-isu tersebut akan diatur melalui penerapan syariah Islam. Strategi kedua bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan HTI dalam menerapkan kembali Khilafah Islamiyah sebagai kondisi awal bagi tercapainya syariah Islam. Strategi pergerakan HTI mengacu pada strategi yang ditetapkan oleh HTI internasional yang terinspirasi oleh strategi perjuangan Nabi. Secara umum, strategi itu mencakup tiga tahapan (marhalah) perjuangan. Tahap pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (marhalah tasqif). Pada tahap ini, yang dilakukan adalah membentuk kader-kader partai.

Tahap kedua, tahap interaksi dengan masyarakat (marhalah tafa'ul ma'a al-ummah). Pada tahap ini, para kader partai diturunkan di tengah masyarakat untuk mengenalkan gagasan HTI. Dalam tahapan ini, para aktivis HTI menawarkan jawaban keislaman atas segala persoalan masyarakat, sehingga umat Islam yakin dengan kebenaran Islam. Tahap ketiga adalah tahap pengambil alihan kekuasaan (marhalah istilam al-hukm). Setelah umat sadar akan kebenaran tunggal Islam, maka secara otomatis umat akan menuntut diterapkannya hukum Islam dan pendirian negara Islam (Rubaidi, 2017).

Respon Terhadap HTI di Indonesia

Setelah HTI muncul di Indonesia, muncul berbagai tanggapan pro dan kontra terkait gerakan ini. Namun, kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan penerapan sistem khilafah HTI di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra, ini mencerminkan bangkitnya UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (AntiSubversi) yang telah dicabut pada April 1999. UU Subversi memiliki Pasal 1 yang melarang perongrongan terhadap negara dan Pancasila. Istilah "perongrongan negara" dianggap sebagai pasal karet yang digunakan untuk mengatasi ekstrem kanan dan kiri. Respon kontra ini selain lahir dari kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme, juga berangkat dari konsekuensi demokrasi yang memberikan kebebasan, termasuk terhadap musuh-musuh demokrasi. Artinya, meskipun gerakan radikal Islam ingin menggantikan NKRI dengan khilafah, gerakan ini tidak dapat dilarang demi konsistensi demokratik. Gerakan radikal dapat dilarang jika melakukan tindakan kriminal, sehingga pelarangannya ditentukan oleh keputusan hukum di pengadilan (Muazaroh, 2019).

Bagi kalangan yang mendukung, pasal ini dilihat sebagai langkah tegas yang telah lama ditunggu setelah negara tidak tegas menghadapi ancaman ideologi kelompok radikal. Pada tingkat perundang-undangan, pasal ini dianggap lebih tegas daripada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang masih tolerir asas sebuah organisasi selama organisasi tersebut menjadikan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Meskipun HTI telah dibubarkan, gerakan ini bermetamorfosis dalam kelompok-kelompok yang menyebarluaskan ajaran mereka melalui media online. Salah satunya adalah BMI (Jahar, 2015).

Metamorfosis HTI di Media Online (BMI)

Setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017, muncul kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan sistem khilafah di Indonesia, salah satunya adalah kelompok BMI. BMI merupakan kelompok yang aktif melakukan pergerakan di media sosial. Hal ini mereka lakukan untuk menggambarkan pemikiran

dan kritikan terhadap situasi yang menurut mereka tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Kelompok BMI adalah kelompok keagamaan yang anggotanya terutama perempuan, khususnya mahasiswi muslimah. Kelompok BMI merupakan komunitas yang berjuang dalam menerapkan Islam Kaffah (Back to Muslim Identity). Komunitas ini berjuang untuk menjalankan syariat Islam, dan kelompok BMI aktif dalam menanggapi situasi yang terjadi di pemerintahan dan peristiwa-peristiwa yang sedang hangat terjadi. Mereka selalu melihat peristiwa dengan sudut pandang kaca mata Islam. Selain itu, komunitas ini selalu menawarkan solusi masalah dengan sudut pandang Islam juga (Muhsin, 2012).

Penawaran yang mereka berikan merupakan solusi terbaik bagi mereka, yaitu penyelesaian dengan cara Islam. Karena metode yang di luar Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai metode yang tidak diterima, karena tidak sesuai dengan Islam. Kelompok BMI bisa dianggap sebagai kelompok yang radikal, dalam arti bahwa mereka tidak radikal seperti kelompok ISIS. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok ini mirip dengan HTI. Kelompok BMI juga sering mengangkat isu tentang perempuan dan sangat menentang feminisme. Seperti unggahan yang mereka posting pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu, yang mengusung isu "jika untuk memuliakan perempuan mengapa harus dengan feminisme?". Hal yang mereka tegaskan adalah bahwa jauh sebelum feminisme muncul, jalan untuk meningkatkan peran perempuan telah lebih dulu hadir yaitu dengan petunjuk cahaya Islam. Komunitas ini menganggap bahwa sudah seharusnya umat Islam kembali kepada aturan Islam, dan pernyataan bahwa perempuan adalah produk nomor dua dikarenakan umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan (A. Rahman et al., 2015).

Keanggotaan kelompok BMI secara tidak langsung termasuk para pengikut dari akun media sosial. Berdasarkan data yang ditemukan, pengikut BMI dari media sosial menunjukkan jumlah yang besar. Seperti di media Facebook sebanyak 12.055 akun pengikut, dan untuk Instagram dengan jumlah sebanyak 12.362 akun pengikut, serta di Twitter 9.119 akun pengikut. Hal ini menunjukkan pengikut media sosial yang bisa dikatakan besar. Berdasarkan data yang ditemukan, keanggotaan kelompok BMI terutama terdiri dari perempuan muslimah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari postingan-postingan dan pengikut dari kegiatan yang diadakan oleh kelompok BMI. Untuk merekrut keanggotaan, kelompok BMI melakukan kegiatan seperti kampanye di depan kampus maupun di tempat yang terbuka. Hal ini dalam rangka mensosialisasikan gerakan mereka dan menarik simpati dari mahasiswi-mahasiswi muslimah Indonesia. Berdasarkan data yang ditemukan, kebanyakan anggota BMI adalah perempuan muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari kegiatan-kegiatan mereka, yang mayoritas dihadiri oleh para mahasiswi-mahasiswi muslimah Indonesia (Qohar & Hakiki, 2017).

Dalam mengorganisasi pergerakan mereka, BMI melakukan pembinaan keanggotaan baru. Pembinaan keanggotaan baru pada dasarnya merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini berguna untuk pengkaderan kelanjutan gerakan yang mereka lakukan, dalam rangka mengorganisasi pemahaman kaffah yang mereka yakini sebagai suatu hal yang sudah jauh dari peradaban saat ini. Pembinaan keanggotaan kelompok BMI jika dilihat bisa dilakukan dengan cara offline dan online. Pembinaan keanggotaan baru dalam rangka pengkaderan dilakukan secara online, hal ini disebabkan oleh kondisi belakangan ini. Dalam beberapa tahun belakang, situasi saat ini banyak sekali dibatasi dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Pembinaan secara online maupun offline dalam rangka pembinaan keanggotaan dalam kelompok BMI pada dasarnya tidaklah dilakukan secara formal, berbeda dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada umumnya (Tahir & Tahir, 2020).

Pembinaan keanggotaan kelompok BMI dilakukan dalam hal penanaman nilai-nilai yang menjadi landasan mereka, seperti ideologi yang mereka pahami. Penanaman nilai-nilai ini dilakukan dalam rangka memperkuat keyakinan dan tekad dalam mengorganisasi tujuan mereka dalam menegakkan Islam kaffah. Pembinaan keanggotaan secara online ini biasanya dilakukan dengan menggunakan media Zoom dan tulisan-tulisan yang mereka terbitkan. Pembinaan keanggotaan kelompok BMI biasanya menekankan pada aspek-aspek masalah Islam kaffah. Hal ini mereka lakukan demi meyakinkan atau mendoktrin anggota bahwa landasan dan tujuan mereka dalam mengkampanyekan Islam kaffah adalah suatu ibadah sehingga hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi mereka (Qohar & Hakiki, 2017).

Media Sosial sebagai Alat Mengorganisir Ideologi Khilafah BMI

Dalam melaksanakan gerakannya, kelompok BMI menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan gerakan dan menambah pengikutnya. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan menggunakan Zoom, pengajian online, dan menyebarkan narasi-narasi yang berbentuk pemahaman mereka. Hal ini mereka lakukan dalam rangka memobilisasi pengikut mereka di media sosial. Dan yang terpenting adalah menanamkan pemahaman

atau ideologi mereka. Kelompok BMI memiliki kegiatan-kegiatan yang rutin, baik di lapangan maupun di media sosial. Perjalanan BMI semenjak dibuat grup di media sosial pada tahun 2016, mereka sudah mulai mengorganisir atau memperjuangkan khilafah, hak-hak perempuan, dan lain-lain. Semenjak munculnya BMI dengan munculnya akun-akun mereka di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, mereka gencar memperjuangkan misi mereka, yaitu berdirinya sistem khilafah di Indonesia. Hal ini mereka bungkus dengan ajaran-ajaran Islam beserta dalil-dalil Al-Qur'an. Kemudian mereka menyalakan hal-hal yang di luar Islam, baik dari sistem kehidupan ataupun sistem kenegaraan yang di luar Islam, seperti Liberalisme, Sosialisme, Kapitalisme, dan lain-lain (Wildan, 2017).

Kelompok BMI memiliki keselarasan dalam visi dan misi, karena merupakan anak kandung dari kelompok HTI. Akan tetapi, setelah HTI dibekukan oleh pemerintah, BMI merupakan salah satu instrumen HTI dalam melanjutkan tongkat estafet gerakan mereka. Kelompok BMI semakin gencar mengorganisir khilafah, beserta kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa bertolak belakang dengan misi mereka, dan bertolak belakang dengan Islam. Tidak terlepas dari itu, kelompok BMI ikut mengkritik kebijakan tersebut, seperti Omnibus Law, RUU PKS, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa sepak terjang BMI dalam waktu kurang lima tahun belakangan ini, mereka tetap eksis terutama di media sosial.

Kelompok BMI merupakan kelompok yang berideologi Islam, di mana hal yang mereka tuntut dan diorganisir baik di media sosial maupun di lapangan adalah menyuarakan Islam dan segala sesuatu harus kembali kepada Islam. Pemahaman atau ideologi yang diusung kelompok BMI merupakan suatu pemahaman atau ideologi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari postingan yang mereka sebarkan di media online seperti postingan "Rezim Demokrasi Kian Mematikan Potensi Generasi" pada tanggal 20 Desember 2020 yang ditulis oleh Dwi Rahayu, S. Ikom (Aktivis BMI Community). Dalam tulisan tersebut, ia mengungkapkan bahwa kualitas anak muda sangat menentukan kualitas bangsa. Pentingnya peran generasi seperti halnya yang diungkapkan Khalifah Umar Bin Khattab, "tiap kali ku hadapi masalah, yang aku panggil adalah anak muda".

Menurut pemaparannya, generasi muda yang berkualitas bukan hanya generasi yang paham dengan ahli dalam ilmu sains dan teknologi, melainkan juga memiliki kepribadian yang istimewa, perilaku yang sholeh, dan bertaqwa. Dari ungkapan tersebut, terlihat bahwa kepribadian yang sholeh dan bertaqwa tidak hanya mampu membawa negaranya maju dan besar, tetapi juga membuat negara tersebut disegani oleh musuh-musuhnya. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan negara yang maju dan besar, maka haruslah dibentuk negara yang visioner. Negara tersebut berlandaskan agama dalam pengaturan kebijakan berbangsa dan bernegara, bukan seperti negara sekuler yang memisahkan agama dan negara. Dari judul besar yang diusung, terlihat bahwa kerusakan generasi terjadi karena kesalahan paradigma dalam pengelolaan negara. Dengan sistem pemerintahan demokrasi yang diadopsi oleh negara ini, dalam upaya melemahkan generasi muda saat ini, dibentuklah kurikulum sekuler yang terus mendorong moderasi dalam Islam, merusak identitas Islam, dan merevisi ajaran Islam seperti mewajibkan Khilafah, dengan strategi Counter Violent Extremism, yaitu menjauhkan Islam Kaffah dari pikiran generasi muda, dengan label radikal, intoleran, dan persekusi.

Dalam postingan lain yang berjudul "Kejayaan, Keruntuhan, dan Kebangkitan Khilafah" oleh Putri Maryam, 21/03/2021, penulis memaparkan bahwa nasib kaum muslimin berubah 180 derajat setelah runtuhnya daulah Khilafah. Yang awalnya merupakan pusat peradaban dunia, kini menjadi masyarakat yang tertinggal dan terbelakang. Yang dulunya pusat perkembangan ilmu dan teknologi, sekarang mengalami kemunduran intelektual. Meninggalkan syariat Islam dianggap sebagai keputusan terburuk dan awal bencana bagi kaum muslimin. Pada kesimpulannya, penulis menjelaskan bahwa keterpurukan umat Islam saat ini disebabkan oleh ketiadaan penerapan syariat Islam secara kaffah.

Dari dua postingan dan isi tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi yang diusung oleh kelompok BMI adalah Ideologi Khilafah, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan menghapus peraturan, pemikiran, dan sistem yang diluar Islam. Mereka berpendapat bahwa sistem-sistem tersebut dapat merusak dan menjatuhkan Islam. Pemikiran kelompok BMI didasarkan pada pemaknaan konteks yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu kewajiban yang berhukum dengan hukum Allah dan berlandaskan Ideologi Islam Kaffah (Jahar, 2015).

Dari pemahaman atau ideologi yang mereka anut, muncul berbagai pemikiran, seperti kebangkitan Islam yang hanya akan terjadi dengan adanya sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Mereka meyakini hal ini dengan mengacu pada masa Khilafah Islamiyyah. Bagi BMI, Khilafah harus ditegakkan karena empat alasan

utama. Pertama, penerapan Islam secara kaffah hanya dapat terwujud dalam kerangka Khilafah Islamiyyah. Kedua, hanya Khilafah yang dapat menjamin serta menjaga keamanan dan nyawa umat Muslim. Ketiga, hanya Khilafah yang dapat menghilangkan penistaan terhadap Islam di seluruh dunia. Keempat, karena Islam adalah rahmatan lil'alamin dan hanya negara yang mampu menyebarkan dakwah Islam secara efektif dan efisien ke seluruh dunia. Dari analisis mengenai kelompok HTI dan BMI, terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan ideologi atau landasan berpikir. Ini dibuktikan dengan pemahaman mereka yang sama-sama ingin menegakkan sistem Khilafah dan menolak sistem berpikir orang-orang Barat (Harjuna, 2018).

Pengembangan ideologi Khilafah yang dilakukan oleh kader atau anggota kelompok BMI secara tidak langsung dipengaruhi oleh orang-orang yang paham akan landasan berpikir kelompok mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa anggota baru juga dapat menyebarkan pemahaman atau ideologi mereka. Terutama dalam kondisi kemajuan teknologi yang memungkinkan penyebaran berita tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Pengembangan ideologi atau landasan berpikir BMI biasanya disebarluaskan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pada dasarnya, kelompok BMI bergerak melalui media. Pengembangan pemahaman ini, yang terkadang bersifat radikal dalam penafsiran situasi tertentu, dilakukan melalui postingan berbentuk tulisan yang diunggah oleh anggota kelompok (Saputra, 2023).

Pengembangan pemahaman ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meluaskan jangkauan gerakan mereka. Misalnya, dalam postingan melalui Facebook yang ditulis oleh Siti Nafidah Anshory, M. Ag dengan judul "Resolusi 2021: Umat Menyongsong Abad Khilafah." Tulisan tersebut menyatakan bahwa demokrasi dianggap sebagai akar kerusakan. Dalam narasi ini, seluruh masalah saat ini dianggap terkait dan berakar dari satu penyebab, yaitu penerapan sistem sekuler demokrasi yang menafikan peran Allah SWT dalam kehidupan, dan memberikan hak pembuatan hukum kepada akal manusia yang lemah dan terbatas. Penulis juga menjelaskan bahwa bencana yang sering terjadi pada tahun 2021, termasuk lebih dari 2000 kasus banjir, longsor, gempa bumi, dan gunung meletus, dianggap sebagai akibat dari kedurhakaan kepada Allah SWT. Tidak terlepas dari itu, penulis mengajak pembaca dan umat Islam pada umumnya untuk mempertimbangkan perubahan sistem dan norma guna menjadikan Islam sebagai dasar negara yang besar. Dari kesadaran ini, diharapkan penegakan Khilafah dapat membawa kesejahteraan sejati dan berkah dalam hidup melalui penerapan hukum Islam (Hayati, 2017).

Bagi BMI, Al-Quran adalah pedoman hidup yang berisi aturan-aturan Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam ranah pribadi maupun dalam berbangsa dan bermasyarakat. Mereka melihat pilihan antara Pancasila dan Al-Quran sebagai upaya untuk mendorong moderasi dalam beragama, yang menurut mereka, bertentangan dengan ajaran Islam yang diterapkan secara kaffah ketika Khilafah Islam masih ada. Mereka menganggap agenda moderasi beragama sebagai upaya Barat untuk mengalihkan umat Islam dari pemahaman Islam yang benar dan untuk menghambat kebangkitan Islam. Oleh karena itu, BMI mengajak generasi milenial untuk melawan moderasi beragama, yang menurut mereka dapat merusak akidah umat dan mengancam syariat Islam (Sobur, 2002).

Dalam melaksanakan gerakan untuk meningkatkan eksistensi suatu gerakan, kelompok BMI menyebarkan berbagai wacana. Dari total 1055 postingan yang mereka sebarluaskan, terdapat tiga klasifikasi wacana yang dapat diidentifikasi. Pertama, masalah sosial politik, seperti postingan di Instagram pada tanggal 09/07/2022 tentang "Perubahan Hakiki Tak Bisa dengan Jalan Demokrasi." Dalam narasi tersebut, anggota kelompok BMI menyatakan bahwa permasalahan di dalam negara tidak hanya tergantung pada siapa yang memimpin, karena meskipun sudah beberapa kali rezim berganti, kondisi tidak membaik, bahkan semakin kritis dari hari ke hari. Menurut BMI, perubahan yang dibutuhkan harus mencakup perubahan dalam sistem.

Kedua, wacana tentang pemahaman keagamaan (ideologi), yang diposting pada tanggal 27/02/2022 yang berjudul "Rentan Terpapar Radikalisme?". Menurut hasil penelitian BNPT, perempuan di kalangan perkotaan yang aktif di internet berpotensi terpapar pemahaman radikalisme. BMI mengutip hasil penelitian ini dan mengkritiknya, menyebutnya sebagai framing bahaya yang menyesatkan. Mereka menilai bahwa isu radikalisme selalu menyalahkan agama, padahal masih banyak masalah yang dihadapi kaum perempuan dan generasi muda, seperti kekerasan terhadap perempuan, stres sosial, arus liberalisasi, dan kegagalan sistem pendidikan dalam membina generasi yang berisiko menjadi generasi yang terlupakan (lost generation).

Ketiga, wacana tentang pendidikan, salah satunya adalah postingan Instagram pada tanggal 22/02/2021 yang berjudul "Muslimah Cerdas, Menjunjung Tinggi Identitas". Narasi yang disampaikan menyatakan bahwa

jilbab adalah identitas seorang muslimah. Dalam sebuah syair, disebutkan bahwa jilbab adalah lambang kesucian. BMI mengkritik bahwa jilbab kini tidak lagi dianggap sebagai identitas seorang muslimah, tetapi sering hanya dijadikan tren fashion, yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan jilbab bagi muslimah. Mereka juga menyebut kasus di SMKN 2 Padang yang mewajibkan hijab sebagai contoh, walaupun kelompok BMI tidak menyadari bahwa keluhan berasal dari seorang non-Muslim, sehingga narasi mereka memiliki sedikit kesalahan (Wahab, 2016).

Strategi BMI dalam Menyebarkan Ideologi Khilafah

Dalam upaya mewujudkan gerakan dan mengakomodasi aspirasi mereka serta masyarakat, kelompok BMI turun ke jalan sebagai salah satu strategi gerakan mereka. Selama turun ke jalan, mereka juga menyebarkan selebaran buletin yang mengusung konsep khilafah. Pada tanggal 11 Maret 2018, diadakan kegiatan aksi simpatik oleh pemuda dan mahasiswi muslimah dari berbagai komunitas kepemudaan di Surabaya. Sekitar 150 pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut merupakan anggota BMI. Kegiatan ini mengusung tema "Tolak LGBT." Dalam narasi yang disampaikan oleh Jubir aksi, Dwi Maulidiniyah, yang juga anggota BMI, mereka menyatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk mengekspresikan solidaritas pemuda sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi dan keluarga. Mereka mendeskripsikan perilaku LGBT sebagai penyakit sosial yang merusak keluarga dan sebagai perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Mereka menentang pemahaman hak asasi manusia (HAM) yang mendukung perilaku LGBT. Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat untuk menolak sistem sekuler demokrasi yang dianggap sebagai payung bagi LGBT untuk berkembang di berbagai negara. Pemuda Muslimah Surabaya didorong untuk bersama-sama berjuang untuk menghentikan segala bentuk kerusakan dan menentang sistem sekuler kapitalis yang dianggap sebagai akar permasalahan (Saputra, 2023).

Selain melakukan aktivitas demonstrasi, dalam strategi gerakan mereka, aktivis intelektual BMI mengekspresikan pemikiran mereka melalui seminar dan publikasi. Ini adalah upaya untuk menyebarkan pemahaman dan ideologi BMI serta mendapatkan dukungan dari segmen terdidik dalam masyarakat Indonesia. Seminar yang diadakan oleh BMI aktif sebelum dibubarkan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional (Dzakiyyah, 2014).

Penggunaan media sebagai sarana untuk menyebarkan pesan dakwah dan perjuangan BMI kepada audiensi yang lebih luas merupakan salah satu jalur utama yang digunakan oleh kelompok ini. Mereka menyadari bahwa media adalah alat penting untuk menjaga komunikasi dan kesatuan pemikiran di antara anggota dan simpatisan mereka. Oleh karena itu, BMI seringkali membuat berbagai jenis publikasi seperti pamflet, buletin, majalah, tabloid, booklet, buku, dan lain-lain. Media sosial juga digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan ideologi mereka. Sebagai contoh, dalam postingan di Instagram, BMI menyatakan bahwa "Islam Solusi Hakiki bagi Kemaslahatan Rakyat" dan mereka menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam mencakup berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu dalam masyarakat secara keseluruhan (M. T. Rahman et al., 2023).

KESIMPULAN

Gerakan BMI (Back To Muslim Identity) merupakan salah satu ekspresi dari keinginan untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia, mengikuti jejak HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Pada awalnya, HTI muncul di Indonesia pada awal tahun 1980-an, namun pada tahun 2017, gerakan ini dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, ideologi HTI tidak berhenti berkembang, dan beberapa kelompok, seperti BMI, masih mengusung cita-cita mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Metamorfosis HTI menjadi BMI dapat dilihat dari ideologi dan pola gerakan mereka yang terus mereka promosikan melalui media online. Seperti HTI, BMI juga menganut ideologi khilafah, sehingga ada kesamaan ideologis di antara keduanya. Sementara HTI secara hukum telah diilegalkan oleh pemerintah, mereka masih beroperasi dengan cara-cara yang lebih diam-diam. Pola pengembangan pemahaman HTI oleh BMI melibatkan berbagai strategi yang mencakup pendekatan ke pemuda dan terdidik dalam masyarakat, kampanye terhadap pemahaman mereka, dan kongres untuk merekrut anggota baru dan menanamkan nilai-nilai ideologi mereka. BMI menggunakan berbagai strategi untuk menyebarkan pemahaman dan ideologi mereka, termasuk melalui demonstrasi, seminar, diskusi publik, dan media sosial. Meskipun terdapat kesamaan dengan HTI dalam hal ideologi, BMI mencoba tetap aktif dalam gerakan mereka meskipun sudah diilegalkan oleh pemerintah.

REFERENCES

- Arifan, F. A. (2014). Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 94–102.
- Arifin, S. (2014). Gerakan Keagamaan Baru dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial atas Hizbut Tahrir. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 117–138.
- Azis, A. (2003). Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 282–291.
- Azman, A. (2018). Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 99–113.
- Brown, L. C. (2000). *Religion and state: The Muslim approach to politics*. Columbia University Press.
- Dzakiyyah, A. (2014). Tinjauan Umum Gerakan Sosial. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 10(1), 21–41.
- Fitriyana, S. N. (2019). Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca Dibubarkan. *Islamic Communication Journal*, 4(2), 119–211.
- Haris, A., Rahman, A. B. A. B., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 15–24.
- Harjuna, M. (2018). Islam dan Resolusi Konflik. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 14(1), 23–43.
- Hayati, N. (2017). Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12 (1).
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muazaroh, S. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 16(1), 103–120.
- Muhsin, I. (2012). Gerakan penegakan syariah: studi gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(1), 43–61.
- Qohar, A., & Hakiki, K. M. (2017). Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran. *KALAM*, 11(2), 365–396.
- Rahman, A., Akhir, M., & Syaribulan, K. (2015). Gerakan sosial masyarakat peduli lingkungan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(2), 175–184.
- Rahman, M. T., Bukhori, B., & Setia, P. (2023). Hizbiyyah and Hizbut Tahrir Indonesia's New Member Recruitment Strategy After Disbandment. *FIKRAH*, 11(1), 41–64.
- Rubaidi, R. (2017). Variasi gerakan radikal Islam di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 33–52.
- Saputra, Y. (2023). Back To Muslim Identity: Framing the Khilafah Ideology on Social Media. *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY*, 2(1).
- Setia, P., Rahman, M. T., & Al-Obaidi, K. (2022). *Agama dan adopsi media baru: Penggunaan internet oleh gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia*.
- Sinaga, M. H. S., Maulana, A., Akbar, I., Lubis, M. A., Haikal, H., & SiregaR, R. M. (2022). Peran Kementerian Agama dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Al-Qiyam*, 3(1), 21–25.
- Sobur, A. (2002). Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing. *Bandung: PT Remaja Rosda Karya*.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Intrans Publishing.
- Tahir, I., & Tahir, I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74–83.
- Wahab, L. A. (2016). Metamorfosa Radikalisme Pada Lembaga Pendidikan di Sulawesi Tenggara. *Shautut Tarbiyah*, 22, 69–90.

Wildan, M. (2017). *Kontestasi Islam di Facebook: Studi Sociolinguistik*.



© 2024 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).